

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Asia Pasifik dewasa ini merupakan sebuah kawasan yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap dunia, terdapat 21 negara yang tergabung dalam kawasan yang besar akan manfaat kerjasama namun juga berpotensi menimbulkan konflik ini. Pada era pasca Perang Dingin dan selanjutnya memasuki era globalisasi, dunia mengalami pergeseran kekuatan (Power Shift) yaitu dari Barat ke Timur. Dengan kemajuan yang pesat di sektor ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan pertahanan, terutama di India, Korea Selatan, Jepang, China, dan Taiwan, maka kawasan Asia Pasifik saat ini menjadi perhatian dunia. Khususnya di sektor keamanan regional, kawasan Laut China Selatan menjadi pusat perhatian dunia apalagi setelah negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris mulai menyebarkan pengaruhnya terhadap negara-negara di Asia Pasifik untuk kepentingan tertentu.

Kawasan ini dikelilingi sepuluh negara pantai (China/RRC, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina), dimana negara-negara tersebut mempunyai kepentingan berupa Jalur Lintas Perdagangan atau Sea Lanes Of Trade (SLOT)

Internasional. Terlebih lagi, negara-negara tersebut mengandung cadangan sumber daya alam dunia seperti minyak bumi, gas, dan fosfor. Khusus di Kepulauan Spratly, di wilayah tersebut mengandung 25-30 milyar meter kubik cadangan gas bumi, 105 milyar barel cadangan minyak bumi, dan 370 ribu ton fosfor. Potensi sumber daya alam tersebut yang menjadikan kawasan Asia Pasifik khususnya di Laut China Selatan menjadi potensi munculnya konflik.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup global maupun regional Asia Pasifik telah menimbulkan dampak positif dan negatif, baik dalam kawasan itu sendiri maupun kawasan global. Dampak positif yang sangat dirasakan adalah laju pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan di kawasan Asia, terutama di wilayah timur Asia. Tren jangka panjang (1970-2000) menunjukkan pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, sedangkan tren pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Asia semakin meningkat. Dengan dampak positif ini, kawasan timur Asia akan menjadi pusat perekonomian di Asia Pasifik bahkan pusat perekonomian global.

Disisi lain, dinamika lingkungan strategis global juga menimbulkan dampak negatif bagi kawasan Asia Pasifik. Sengketa wilayah maupun klaim teritorial yang melibatkan beberapa negara di kawasan tersebut-contoh jelas adalah konflik di Laut China Selatan- telah mengundang keterlibatan negara-negara luar di luar kawasan. Hasilnya, kondisi ini jelas meningkatkan suhu stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Munculnya instabilitas keamanan di kawasan ini terutama disebabkan oleh persaingan yang terjadi antara China dan

Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan. Meskipun ada sejumlah isu lain yang mengancam stabilitas keamanan di Asia Pasifik, tetapi persaingan China dan Amerika Serikat tersebut tidak dapat dipungkiri karena keduanya memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Hal ini justru akan menimbulkan kerugian bagi negara-negara lain di kawasan itu yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan disana.

Dari penjelasan singkat diatas, tergambar sangat jelas bahwa dinamika politik, ekonomi, dan keamanan di Asia Pasifik menghadapi sebuah tantangan yang masif dari kekuatan-kekuatan besar dan kepentingan yang berbeda. Apabila tidak dikelola dengan baik, pertemuan antara kepentingan yang berbeda dengan kekuatan besar dalam kompetisi yang sengit daripada kerjasama, justru berpotensi mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, penulis menganggap permasalahan ini sangat penting, signifikan, dan menarik untuk dikaji lebih lanjut karena memiliki aspek dalam hubungan internasional; yaitu politik dan ekonomi internasional serta aspek keamanan kawasan. Dalam kesempatan ini, penulis memutuskan untuk memilih judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG NEGARA-NEGARA ASIA PASIFIK DALAM MEMBENTUK KERJASAMA KOMPREHENSIF UNTUK MENCIPTAKAN STABILITAS KEAMANAN KAWASAN”**.

B. Latar Belakang Masalah

Asia Pasifik adalah sebuah kawasan yang meliputi pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara, dan Australasia serta negara-negara yang berada di pesisir Samudra Pasifik. Walaupun secara deskripsi geografis kurang tepat, istilah penyebutan “Asia Pasifik” terkenal pada 1980-an ketika pertumbuhan ekonomi terlihat signifikan di negara-negara pesisir Samudra Pasifik misalnya dalam hal perdagangan, saham, dan bentuk interaksi ekonomi dan politik yang menjadi topik pembicaraan utama. Negara-negara yang masuk ke dalam kawasan Asia Pasifik antara lain Australia, Brunei, Kamboja, Cina, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.¹

Selain dari cakupan geografis, anggota negara Asia Pasifik juga ditentukan dari kerjasama yang dilakukan dengan negara luar, seperti misalnya kerja sama Ekonomi Asia Pasifik memasukkan Amerika Serikat, Kanada, Chili, Rusia, Meksiko, dan Peru kedalam komunitas tersebut. Dengan banyaknya negara yang memiliki kepentingan di kawasan ini, semakin kompleks permasalahan yang mereka hadapi terutama masalah stabilitas keamanan kawasan. Pengelompokan negara pasca Perang Dingin regional di kawasan Asia Pasifik juga umumnya telah dipromosikan berdasarkan besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan dari negara anggota. Khususnya, negara-negara tersebut lebih disukai untuk berbagai

¹ “Asia-Pasifik” <http://id.wikipedia.org/wiki/Asia-Pasifik> Diakses: Jum’at, 16 November 2012 pukul 21:28

alasan keamanan ekonomi meskipun faktor keamanan politik masih menjadi fokus utama bagi negara Asia Pasifik.²

Salah satu faktor penting untuk menjaga kelangsungan sebuah negara adalah dengan menjaga pertahanan serta stabilitas keamanan agar dapat *survive* ditengah-tengah gempuran berbagai isu yang menyangkut keamanan dunia. Asia Pasifik sebagai kawasan strategis menanggapi hal ini sebagai permasalahan serius yang menyangkut masa depan kawasan negara-negara yang berada di dalamnya. Meskipun tidak ada organisasi formal kawasan yang membahas stabilitas keamanan kawasan (seperti Asia Tenggara dalam ASEAN), pembentukan sebuah kerjasama untuk menjaga keamanan dianggap perlu dan dalam hal ini berbagai pertemuan yang dilakukan oleh pemimpin negara di Asia Pasifik sebenarnya memberikan sinyal positif akan hadirnya perjanjian atau kesepakatan yang terkait akan stabilitas keamanan kawasan. Respon positif tersebut yang menjadi indikator munculnya berbagai kerjasama keamanan yang dapat diimplementasikan kedalam kawasan Asia Pasifik.

Lingkungan strategis dalam tingkat global dan regional akan mempengaruhi keseluruhan arah kebijakan politik luar negeri dan pertahanan nasional, termasuk pembangunan kemampuan diplomasi, pembangunan kekuatan, serta kebijakan strategis apa yang akan diambil dan diimplementasikan oleh

² D. Rumley. 2005, "The Geopolitics of Asia-Pacific Regionalism in the 21st Century" Dalam *The Otemon Journal of Australian Studies* 31. Hlm 5-27.

sebuah negara untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis itu.³ Keamanan Asia Pasifik dijadikan barometer bagi stabilitas global. Masalahnya, karena di kawasan ini potensi kebangkitan ekonomi dan politik telah muncul, dan menjadi aset besar bagi suksesnya pembangunan ekonomi-politik global di masa depan. Oleh karena itu, banyak perhatian tertuju ke kawasan ini. Sementara itu, secara internal, di kawasan ini ternyata menyimpan bahaya laten yang akan memicu konflik bagi keamanan regional dan internasional. Lebih dari itu, kawasan ini telah dihantam badai krisis ekonomi yang tampaknya cukup alot.

Pasca berakhirnya Perang Dingin, situasi internasional mengalami sebuah perubahan yang besar, perdamaian dunia dan pembangunan dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan tantangan. Konsep pertahanan dan keamanan Asia Pasifik ini membuktikan anggapan tentang adanya ancaman keamanan global dalam periode mendatang di kawasan strategis ini. Kendati demikian, situasi keamanan di Asia Pasifik secara keseluruhan masih diliputi stabilitas, perdamaian, pembangunan, dan kerjasama.⁴ Namun di tengah keamanan regional yang masih terkendali, sejumlah faktor negatif tidak boleh diabaikan begitu saja. Seperti krisis keuangan yang menyebabkan jatuhnya perekonomian beberapa negara di Asia Pasifik dapat memberikan dampak besar dan mengancam stabilitas politik dan keamanan internasional.

³ Ikrar Nusa Bakti. 2003. "Arti Geopolitik Asia Pasifik bagi Indonesia di Masa Mendatang". Makalah disampaikan dalam Seminar *Konstelasi Geopolitik Asia Pasifik: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran.

⁴ Letnan Jenderal Ma Xiaontian: Mencermati Kerjasama Keamanan Asia Pasifik http://dunia.vivanews.com/news/read/67832-mencermati_kerjasama_keamanan_asia_pasifik diakses: Rabu, 13 Juni 2012 pukul 19:03

Keadaan politik dan keamanan di Asia Pasifik sendiri yang sebenarnya mendasari perlunya dibentuk sebuah kerjasama pertahanan dan keamanan yang komprehensif. Konflik yang terjadi di Laut China Selatan misalnya, yang melibatkan negara-negara yang justru berada di kawasan Asia Pasifik. China tentu saja dengan kekuatan armada militer tangguh dapat menjadi ancaman bagi negara lain yang juga memiliki kepentingan disana, yang mempengaruhi hal tersebut adalah faktor geopolitik dari negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut.

Faktor geopolitik akan berbeda antara satu negara dan negara lainnya tergantung pada besarnya negara (menurut luasnya) dan kedekatan ancaman.⁵ Tentu saja ini menjadi keuntungan tersendiri bagi negara lain yang juga memiliki kepentingan atas Laut China Selatan seperti Filipina dan Jepang yang memiliki afiliasi militer dengan Amerika Serikat, atau Vietnam yang membangun pangkalan militer dan mengadakan latihan bersama angkatan laut India dan Jepang. Semuanya dilakukan untuk mengimbangi kekuatan militer China yang kuat yang dikhawatirkan akan lebih mendominasi konflik tersebut.

Peran China untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menjaga perdamaian dan kemakmuran bersama di kawasan Asia Pasifik.⁶ Sebagaimana perekonomian China terus tumbuh, maka China akan semakin memiliki wewenang di kawasan Asia Pasifik. Kesejahteraan, pembangunan, dan stabilitas

⁵ Frank Bealey. 2000. "The Blackwell Dictionary of Political Science". Dalam *A User's Guide to Its Terms*. Oxford: Blackwell. Hlm 145.

⁶ General Ma Xiaotian. 2010. "New Dimensions of Security" Second Plenary Session at *The 9th IISS Asian Security Summit: The Shangri-La Dialogue*. Singapore.

Asia Pasifik akan diperoleh berdasarkan manfaat dari China. Sementara itu, China tidak dapat mengembangkan dirinya sendiri tanpa kemakmuran keamanan, stabilitas dan ekonomi kawasan Asia Pasifik, maka China dan Asia Pasifik memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. China memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memperluas kontribusi dalam mempromosikan perdamaian dan kemakmuran kawasan, pemerintah China bahkan berkomitmen untuk mencari solusi yang tepat untuk mewujudkan tujuannya.

Kawasan Laut China Selatan yang seringkali berpotensi menimbulkan konflik menjadi tanggung jawab besar China, bagaimana mereka mengakomodir berbagai kepentingan dan memetakan setiap kekuatan yang dimiliki negara-negara tetapi dituntut untuk tetap menjaga stabilitas keamanan regional. Konflik di Laut China Selatan tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan yang langka seperti minyak, ikan, dan sampai tingkat tertentu, transportasi. Bahkan minyak menjadi incaran utama karena hingga saat ini perebutan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini tidak dapat dilepaskan dari konflik militer, bahkan invasi militer Amerika ke Iraq tahun 2003.⁷

Tidak hanya konflik Laut China Selatan, masalah-masalah lain yang menyangkut keamanan di Asia Pasifik sebenarnya lebih dari itu. Isu-isu masif di Asia seperti *border dispute* (konflik perbatasan), terorisme, demokrasi, isu kekerasan dan HAM, *human trafficking*, krisis ekonomi, hambatan perdagangan,

⁷ Bambang Cipto. 2007. "Konflik Laut China Selatan" dalam *Hubungan Internasional Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 204.

kemiskinan dan pengangguran, penyelundupan senjata, serta migrasi ilegal⁸ juga menjadi *concern* bagi para pemimpin negara sehingga diperlukan peran dan kerjasama komprehensif untuk menjaga pertahanan dan stabilitas keamanan di Asia Pasifik.

Berakhirnya Perang Dingin yang mengakibatkan *vacuum of power* (kekosongan kekuasaan) juga membawa persoalan baru bagi stabilitas keamanan Asia Pasifik. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh negara-negara untuk saling memperkuat persenjataan/militer dengan tujuan menjaga kedaulatan masing-masing negara. Sehingga muncul berbagai kekuatan-kekuatan baru di kawasan dan istilah *great powers* pun muncul di Asia Pasifik dengan hadirnya negara-negara kuat dengan kepentingan tertentu. Amerika Serikat, China, Rusia, dan Jepang menjadi kekuatan di Asia Pasifik dengan berbagai kemampuan dan kelebihan yang mereka miliki. Kekosongan kekuasaan juga tidak jarang menyebabkan konflik perbatasan yang disebabkan oleh klaim wilayah, bahwa setiap negara berhak memiliki wilayah kedaulatannya yang didukung oleh *de jure* dan *de facto* yang kuat. Konflik perbatasan yang terjadi antara Indonesia-Malaysia (Sipadan dan Ligitan), Thailand-Kamboja, hingga Semenanjung Korea merupakan beberapa konflik yang menyebabkan gangguan stabilitas keamanan kawasan.

⁸ Adam Graycar. 2000. "Human Smuggling" *Paper presented at Centre for Criminology*. University of Hongkong.

Situasi politik di Timur Tengah juga sebenarnya menjadi isu sentral dan dikhawatirkan di Asia Pasifik selain situasi politik yang tengah memanas di Myanmar atau Thailand-Kamboja. Sejak invasi yang dilakukan Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, stabilitas keamanan di kawasan tersebut menjadi sangat tidak menentu. Meskipun Amerika Serikat perlahan telah berhasil menanamkan pengaruh demokrasi di beberapa negara Timur Tengah (Irak dan Mesir), tidak serta-merta menstabilkan kawasan, justru sebaliknya; negara-negara Timur Tengah lainnya dapat terkena dampak buruk akibat proses demokratisasi seperti halnya yang telah terjadi di Irak.

Dinamika serta pertumbuhan ekonomi di banyak negara Asia Pasifik telah membawa kawasan tersebut kepada perubahan yang positif. Munculnya Jepang, China, dan Singapura sebagai raksasa perekonomian dunia memberikan fakta bahwa Asia Pasifik menjelma menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi terbesar yang mampu menyaingi Amerika, bahkan Eropa sekalipun. Akan tetapi tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks, apabila beberapa masalah tidak dapat ditangani maka akan menjadi tantangan tersendiri yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik seperti konflik kepentingan yang terjadi di Laut China Selatan atau jalur perdagangan di Selat Hormuz. Untuk memastikan keberlangsungan perekonomian yang aman di kawasan, segala bentuk hambatan dan tantangan harus segera diatasi karena ekonomi merupakan unsur penting dalam pembentukan kerjasama komprehensif untuk mencapai stabilitas keamanan di Asia Pasifik.

Dengan situasi politik dan dinamika ekonomi di Asia Pasifik yang menunjukkan sinyal positif, maka integrasi ekonomi politik dapat tercipta dalam rangka mewujudkan keamanan komprehensif. Integrasi ekonomi politik di sebuah kawasan berawal dari inisiatif negara di dalamnya untuk bersama-sama menghapus segala bentuk hambatan baik dalam bidang ekonomi maupun politik agar mempermudah mobilisasi serta hubungan diplomatik negara-negara tersebut. Sesuai dengan karakteristik di Asia Pasifik, dimana perkembangan kawasan diawali oleh sebuah kerjasama ekonomi yaitu APEC, maka kerjasama ekonomi yang ada di kawasan nantinya akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan politik. Sehingga, integrasi ekonomi politik adalah langkah strategis yang harus dilakukan oleh negara-negara Asia Pasifik dalam rangka mewujudkan keamanan komprehensif untuk menciptakan stabilitas keamanan kawasan.

Stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik tentunya dapat diciptakan melalui sebuah kerjasama. Kerjasama tersebut dapat terbentuk apabila negara-negara di kawasan tersebut saling berintegrasi dengan mengedepankan forum dan dialog multilateral. Sejauh ini, setidaknya ada beberapa bentuk kerjasama keamanan multilateral yang ada di Asia Pasifik, diantaranya *ASEAN Regional Forum* (ARF). ARF adalah kerjasama komprehensif pertama di kawasan yang diinisiasi oleh ASEAN dalam rangka mewujudkan keamanan komprehensif dengan tujuan stabilitas keamanan yang ingin diciptakan di Asia Pasifik. Selain itu, ARF fokus terhadap isu-isu keamanan yang berkembang di kawasan, baik isu yang berhubungan dengan keamanan tradisional maupun non-tradisional. Dibantu

dengan Dewan Kerjasama Keamanan Asia Pasifik atau CSCAP, ARF bersama-sama membantu mewujudkan keamanan komprehensif.

Pada umumnya, Asia Pasifik masih menjadi kawasan yang memiliki potensi besar di dunia. Semua negara di kawasan ini saling berbagi orientasi kebijakan dengan mengutamakan dialog dan kerjasama untuk menciptakan kemakmuran dan stabilitas. Isu-isu yang mengemuka di kawasan ini adalah refleksi dari kepercayaan diri, solidaritas, dan kerjasama di tengah krisis dan tantangan global dan regional yang sulit diprediksi. Dengan kata lain, memelihara perdamaian regional, membentuk kerjasama komprehensif, dan menciptakan stabilitas keamanan di kawasan diharapkan mampu mengatasi tantangan-tantangan dan mengubahnya menjadi sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan.

C. Tujuan Penelitian

Di dalam sebuah penulisan, umumnya dilakukan untuk memberikan sebuah gambaran obyektif terhadap fenomena tertentu. Adapun tujuan tertentu dari penelitian ini antara lain:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi keamanan di Asia Pasifik, khususnya setelah berakhirnya perang dingin. Kemudian potensi akan munculnya konflik dan peluang untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. Menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong negara-negara Asia Pasifik dalam membangun kerjasama komprehensif untuk menciptakan stabilitas keamanan kawasan.
3. Mengaplikasikan teori-teori yang penulis peroleh selama mengikuti proses perkuliahan.
4. Penelitian ini adalah sebagai syarat penulis memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

“Apa faktor-faktor yang mendorong negara-negara di Asia Pasifik dalam membentuk kerjasama komprehensif untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan?”

E. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan tentang apa faktor-faktor yang mendorong negara-negara Asia Pasifik dalam membentuk kerjasama komprehensif untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan, penulis menjelaskan hal tersebut dengan menggunakan teori *Comprehensive Security* atau “Keamanan Komprehensif” dengan konsep *Great Powers* dan Teori Integrasi Ekonomi Politik.

1. Teori Comprehensive Security (Keamanan Komprehensif)

Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam tulisan ini adalah teori *comprehensive security* atau keamanan komprehensif. Keamanan komprehensif menjelaskan tentang apa yang menjadi ancaman bagi negara-negara sehingga dibutuhkan pola keamanan yang menyeluruh pada sebuah kawasan. Ada beberapa hal yang harus dipahami mengapa keamanan komprehensif sangat dibutuhkan di sebuah wilayah. Asia Pasifik sangat disadari adalah sebuah kawasan yang sangat luas dan besar dengan keadaan domestik dan keamanan eksternal yang perhatian utamanya berbeda-beda. Aktor yang berpengaruh dalam keamanan di kawasan seperti negara/pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multi-nasional memiliki peran penting dalam perkembangan keamanan politik, ekonomi, sosial, budaya di kawasan.

Comprehensive security sejatinya lebih memperhatikan keamanan negara dan rezim daripada rakyat yang menjadi pusat perhatian keamanan manusia. Karena itu, agar mampu bersinergi dengan keamanan manusia, keamanan komprehensif harus diperluas secara vertikal ke *who should protected against such threats?* dengan menempatkan individu dan komunitas sebagai pusatnya.⁹ Selain itu, teori ini menekankan pada bagaimana negara memiliki sebuah keterikatan dengan negara lain dalam menjaga stabilitas keamanan di sebuah

⁹ Amitav Acharya. 2001. "Human Security" dalam *East versus West*. Summer International Journal. Hlm 453-460.

kawasan tertentu untuk menghindari ancaman dan memperkuat pertahanan mereka.

Dalam buku “The Asia-Pacific Security Lexicon” yang ditulis oleh David Capie dan Paul Evans, dijelaskan bahwa *comprehensive security* harus mengandung beberapa elemen-elemen penting.¹⁰

“The central premise of comprehensive security is that security must be conceived in a holistic way – to include both military and non-military threats to a state’s overall well-being. The concept also stresses the importance of non-military policy responses. Like many security concepts, however the term comprehensive security is used and interpreted in very different ways in different parts of the region”

Elemen-elemen penting yang harus dimiliki untuk membentuk keamanan komprehensif adalah bahwa selain keamanan militer, keamanan non-militer juga menjadi faktor untuk mewujudkannya. Faktor non-militer yang dimaksud antara lain keamanan politik, keamanan sosial, keamanan ekonomi, dan keamanan budaya. Sebagaimana peta kekuatan di Asia Pasifik mulai menyebar dan pola struktur kekuasaan multipolar dalam kawasan muncul, pola bilateral tidak dapat menjadi pilihan yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan atau konflik yang ada. Keseimbangan kekuatan dan keamanan komprehensif harus diimplementasikan diantara negara-negara dan sub-kawasan, sehingga regionalisme akan menjadi lebih kredibel dan menjadi pilihan yang produktif.

Selain itu, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam realisasi pembentukan keamanan komprehensif. Pertama prinsip *mutual interdependence*,

¹⁰ David Capie & Paul Evans. 2002. “Comprehensive Security” dalam *The Asia-Pacific Security Lexicon*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Hlm 65.

keamanan komprehensif menunjukkan interdependensi yang saling menguntungkan diantara berbagai dimensi keamanan. Dengan dukungan keamanan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan fisik antar negara-negara di kawasan, maka keamanan komprehensif akan terjamin. Kemudian prinsip *cooperative peace and shared security*, kerjasama merupakan perwujudan dari keamanan komprehensif itu sendiri khususnya di cakupan yang luas.

Kerjasama ini harus menampung berbagai kepentingan pihak-pihak (negara) agar tercipta keseimbangan kekuatan di kawasan. Prinsip *self-reliance* berkaitan dengan kepercayaan antara satu negara dengan negara yang lain untuk mendukung keamanan komprehensif. Selanjutnya prinsip *inclusiveness*, dimana proses kolaborasi inklusif adalah bagian penting dalam keamanan komprehensif melalui kerjasama. Prinsip perjanjian/kesepakatan damai atau *peaceful engagement* menjelaskan bahwa keamanan komprehensif menunjukkan setiap negara hendaknya menghindari terjadinya konflik, dengan penyelesaian masalah secara damai terutama dengan jalan diplomasi. Terakhir prinsip *good citizenship*, sebagai prinsip pendukung kesuksesan keamanan komprehensif dengan kewarganegaraan yang baik di setiap negara-negara di dalam kawasan.

Inti dari keamanan tradisional digunakan sebagai perlindungan atau pertahanan dari sebuah negara terhadap ancaman atau serangan pihak luar. Persepsi dari keamanan ini kurang lebih sama dengan pengertian dari penggunaan *power/kekuatan*. Dalam pandangan realis, keamanan digambarkan sebagai peran negara dalam penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan atau memastikan

keamanannya. Sementara dalam pandangan neo-realis, keamanan dapat diukur dari militer, ekonomi, dan peran masyarakat.¹¹

Akan tetapi, pembentukan keamanan komprehensif juga sangat ditentukan oleh negara-negara yang memiliki pengaruh kuat, terutama di dalam kawasan. Pada umumnya, *great powers* (negara kuat) memiliki peran kunci dalam menentukan arah yang ingin dicapai kawasan, termasuk peluang terbentuknya kerjasama keamanan komprehensif antara negara-negara Asia Pasifik. Negara kuat biasanya memiliki peran penting dan wewenang tertentu dalam mendukung kemajuan di kawasan dengan berbagai kebijakan yang sanggup untuk mendominasi interaksi internasional. *Great powers* tentu saja memiliki beberapa keunggulan tertentu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kenneth Waltz dalam bukunya “Theory of International Politics” berargumen:

“States are placed in the top rank because they excel in one way or another. Their rank depends on how they score on all of the following items: size of population and territory, resource endowment, economic capability, military strength, political stability, and competence”¹²

Konsep *great powers* memiliki hubungan erat dengan kondisi yang terjadi di Asia Pasifik, karena banyak negara kuat yang berada di kawasan ini dengan berbagai kepentingannya. Negara-negara yang dianggap sebagai *great powers* di Asia Pasifik seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan Jepang merupakan beberapa contoh negara kuat yang mendominasi kawasan, khususnya dalam

¹¹ Otmar Holl. 2011. “Security” dalam *Concepts of Comprehensive Security*. Vienna: Oriental Institute of the Vienna University. Hlm 4.

¹² Kenneth Waltz. 1979. “counting poles and measuring power” dalam *Theory of International Politics*. New York: McGraw Hill. Hlm 131.

bidang politik, militer, dan ekonomi. Bahkan tiga negara diantaranya (AS, China, dan Rusia) adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki Hak Veto. Fakta tersebut jelas menggambarkan kekuatan negara-negara itu, belum lagi dukungan dari kekuatan militer dan finansial yang kuat.

2. Teori Integrasi Ekonomi Politik

Barry Buzan memandang *comprehensive security* tidak hanya dipahami sebagai keamanan negara dan militer, namun juga dalam aspek politik-ekonomi yang terintegrasi, perasaan aman atau tidak aman dari tiap individu di kehidupan bermasyarakat, dan berasumsi bahwa keamanan memiliki hubungan yang erat dengan instrumen politik maupun ekonomi.¹³

“In this view, the military sector is about the relationship of forceful coercion; the political sector is about relationship of authority, governing status and recognition; the economic sector is about relationship of trade, production and finance...”

Pada akhirnya, aspek militer, politik, dan ekonomi yang terintegritasi menjadi kunci dari tercapainya *survival* atau keberlangsungan yang dapat bertahan menunjukkan eksistensinya.¹⁴

“Security is taken to be about the pursuit of freedom from threat and the ability of states and societies to maintain their independent identity and their functional integrity against forces of change, which they see as hostile. The bottom line of security is survival”

¹³ Barry Buzan and Ole Waever. 1998. “Introduction” dalam *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynner Rienner Publisher. Hlm 7.

¹⁴ Barry Buzan. 1991. “New patterns of global security in the twenty-first century” dalam *International Affairs*. London: Royal Institute of International Affairs. Hlm 432-433.

Buzan menjelaskan bahwa *identity* (identitas) dan *integrity* (integritas) merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam sektor-sektor yang berperan dalam terwujudnya keamanan komprehensif yang mampu mempengaruhi stabilitas kawasan. Setidaknya ada tiga poin penting dalam sektor keamanan yang dapat digunakan sebagai langkah terwujudnya keamanan komprehensif. Pertama, *military security* (keamanan militer) yang menyangkut interaksi dua-tingkat; kemampuan militer/persenjataan negara dalam menyerang dan bertahan serta persepsi atau pandangan dari masing-masing negara. Kedua, *political security* (keamanan politik) fokus terhadap stabilitas politik sebuah negara, sistem pemerintahan, dan ideologi yang memberikan mereka legitimasi untuk memerintah negara. Ketiga, *economic security* (keamanan ekonomi) dengan isu utama tentang kemudahan akses terhadap sumber daya negara, hubungan dagang, keuangan dan pasar yang menentukan level kemakmuran sebuah negara atau kawasan.

Keamanan komprehensif tidak dapat diimplementasikan dengan proses tunggal, hanya dari kawasan atau domestik saja tetapi harus melalui kombinasi keduanya. Sifat dasar komprehensif menganjurkan proses luas yang saling melengkapi dan mekanisme menuju wilayah yang lebih spesifik. Bagaimanapun juga, hal ini tidak menghalangi proses dari keseluruhan arah dan koordinasi negara dalam tingkat kawasan. Untuk menyampaikan *comprehensive security* dengan integrasi politik dan ekonomi secara efektif dan efisien di level kawasan,

perlu dibentuk kerjasama riil untuk memperkuat keamanan agar tidak memberikan ruang bagi ancaman tradisional (militer) maupun non-tradisional (politik dan ekonomi).

Kerjasama keamanan menginginkan keamanan diciptakan secara menyeluruh yang tidak hanya mengatasi ancaman keamanan tradisional/militer, tetapi juga politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan demografi yang dapat memperburuk hubungan antarnegara. Alasan ini yang menjadi langkah selanjutnya bagi negara-negara di Asia Pasifik untuk membentuk sebuah kerjasama komprehensif dengan tujuan utama menciptakan stabilitas keamanan di kawasan dan mengatasi ancaman yang timbul dengan keamanan komprehensif. Oleh karena itu, teori *comprehensive security* dan Integritas Politik-Ekonomi ini menjadi faktor utama dalam pembentukan organisasi ataupun kerjasama keamanan di kawasan Asia Pasifik yang bersifat komprehensif.

F. Hipotesis

Dugaan sementara bagaimana negara-negara Asia Pasifik membentuk kerjasama komprehensif untuk menciptakan stabilitas keamanan kawasan didorong oleh:

1. Faktor stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik yang dipengaruhi oleh *great powers* dengan isu keamanan tradisional (militer).

2. Faktor integrasi ekonomi politik yang menjadi instrumen penting di Asia Pasifik selain militer, sehingga mendorong perlunya pembentukan kerjasama komprehensif di kawasan tersebut.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam tulisan ini berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan dibahas. Dengan demikian, pembahasan dalam tulisan tidak mengalami perluasan yang dapat menyebabkan hasil dari penulisan menjadi kurang fokus, rancu dan kurang memiliki nilai ilmiah.

Untuk membatasi masalah yang dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai “Faktor-faktor yang Mendorong Negara-negara Asia Pasifik dalam Membentuk Kerjasama Komprehensif untuk Menciptakan Stabilitas Keamanan Kawasan” ini dibatasi dengan menggunakan jangkauan waktu sejak tahun 1980 hingga tahun 2012. Namun di beberapa bagian dalam tulisan ini tidak tertutup kemungkinan untuk mengulas peristiwa pada tahun-tahun sebelumnya untuk menambah data penelitian dan kepentingan penelitian. Dipilihnya tahun 1980 oleh penulis adalah karena istilah “Asia Pasifik” sendiri mulai dikenal sejak tahun tersebut, sedangkan tahun 2012 merupakan waktu dimana berbagai peristiwa yang dialami oleh Asia Pasifik lebih sering terjadi, termasuk dinamika konflik dan berbagai kerjasama antar negara di kawasan.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini merupakan prosedur untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dan digunakan berdasarkan gambaran keadaan subjek yang dibuktikan dan didukung oleh data-data empiris yang ada. Tulisan ini lebih bersifat *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti buku, jurnal, artikel, surat kabar, majalah, dan media lain yang mendukung penelitian. Penggunaan berbagai macam domain/situs internet sebagai sumber data juga digunakan untuk menunjang tulisan ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk membahas rumusan masalah yang ada, tulisan ini dibagi kedalam 5 bab, hal ini dilakukan agar pokok permasalahan dapat dibahas secara teratur dan berkesinambungan. Sistematika dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini mendeskripsikan mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah yang memuat tentang kondisi terkini dan gambaran tentang Asia Pasifik serta permasalahan yang diangkat, tujuan penelitian, rumusan masalah yang diperoleh sebagai pertanyaan dalam tulisan ini, kerangka teori yang digunakan sebagai keterkaitan terhadap permasalahan yang ada, hipotesis yang merupakan dugaan sementara atas kesimpulan dari tulisan ini, kemudian jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik pasca Perang Dingin

Bab ini akan menerangkan gambaran umum tentang keadaan kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan, mulai dari perkembangannya dulu, khususnya pasca berakhirnya Perang Dingin hingga saat ini. Dinamika yang terjadi di kawasan ini patut untuk dicermati mengingat banyaknya peristiwa penting yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan masalah keamanan.

BAB III: Pengaruh Great Powers terhadap Stabilitas Keamanan Kawasan

Bab ketiga akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kondisi stabilitas keamanan di sebuah kawasan, terutama yang dihadapi oleh negara-negara di Asia Pasifik dimana salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan *great powers* atau negara-negara kuat. Di dalamnya termasuk kekuatan dan peran yang dimiliki negara-negara kuat dalam mempengaruhi keamanan komprehensif dan stabilitas keamanan.

BAB IV: Integrasi Ekonomi Politik dalam Pembentukan Kerjasama Komprehensif

Bab empat akan menjelaskan tentang aspek integrasi ekonomi politik di kawasan Asia Pasifik yang berkontribusi dan berperan penting dalam pembentukan sebuah kerjasama melalui keamanan komprehensif (*comprehensive security*), sebagai tujuan akhir dalam membangun *regional peacekeeping* dan menciptakan stabilitas keamanan di kawasan.

BAB V: Kesimpulan

Dalam bab terakhir atau kesimpulan ini, penulis akan menyimpulkan secara keseluruhan atas penelitian yang dilakukan, dan menjawab rumusan masalah yang diangkat dimana hasil penelitian akan memiliki keterkaitan dengan dugaan sementara.